

DESAIN PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER (I-P2P) LENDING DI DESA MEKARMUKTI KECAMATAN CIHAMPELAS KABUPATEN BANDUNG BARAT

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyana.v6i2.1254>

Syifa Maghfirotul Firdaus*

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung
Syifamfirdaus1@gmail.com

Tuti Kartika

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung
Kartika_64@yahoo.com

Hartono Laras

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung
Hartono.laras@gmail.com

*Penulis Koresponden
Correspondent Author

Journal History

Received: 25 June 2024

Accepted: 17 September 2024

ABSTRACT

Koperasi are a form of organizing poor families that can be carried out in empowerment efforts. However, the current phenomenon is that koperasi have various obstacles and challenges, such as not being popular because the loan system is not accessible and familiar with low repayment rates. The aim of this research is to find out and perfect the Design for Organizing Poor Families through Integrated Peer-To-Peer Lending-Based Koperasi in responding to obstacles and challenges in Koperasi. This research uses a qualitative approach with the PAR (Participatory Action Research) method through FGD (Focus Group Discussion) techniques, in-depth interviews, observation and documentation studies. The primary data sources in this research are informants consisting of village government, community leaders, koperasi administrators, and poor families. The research results show that the Koperasi design based on Integrated Peer to Peer Lending can be implemented and is effective for koperasi to organize poor families by involving active participation in groups by utilizing sub-systems in koperasi in an integrated manner.

KEYWORDS:

Poor Family; co-corporate; Integrated Peer-to-Peer Lending

ABSTRAK

Koperasi menjadi salah satu bentuk pengorganisasian keluarga miskin yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan. Namun, fenomena saat ini, koperasi memiliki berbagai hambatan dan tantangan, seperti tidak diminati karena sistem pinjaman yang tidak aksesibel dan familiar dengan tingkat pengembalian yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menyempurnakan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin Melalui Koperasi Berbasis Integrated Peer To Peer Lending dalam menjawab hambatan dan tantangan pada koperasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode PAR (Participatory Action Research) melalui teknik FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, pendamping koperasi, dan keluarga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain Koperasi berbasis Integrated Peer to Peer Lending dapat diimplementasikan dan efektif bagi koperasi untuk mengorganisasikan keluarga miskin dengan melibatkan partisipasi aktif kelompok anggota dengan memanfaatkan sub-sub sistem pada koperasi secara terintegrasi.

Kata Kunci:

Pengorganisasian; Keluarga Miskin; Koperasi; Integrated Peer to Peer Lending

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan kompleks di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurangnya pendapatan atau tingkat perekonomian yang buruk serta rendahnya aset yang dimiliki (*lack of income and assets*) dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.

Penanganan kemiskinan di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuncoro dalam Rustanto (2015), ia mendefinisikan kemiskinan menjadi lebih sempit, yakni suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.

Suharto (2005) membagi beberapa faktor penyebab kemiskinan, yakni: (1) Faktor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin; (2) Faktor sosial, yaitu kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin; (3) Faktor kultural, terkait kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan di mana secara khusus menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan. Artinya, kemiskinan dapat terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal dari individu, kelompok, atau masyarakat yang mempengaruhi kondisi-kondisi kehidupannya.

Kemiskinan inilah yang menjadi pendorong munculnya keluarga miskin. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga menjadi unit pertama bagi individu untuk belajar berbagai nilai, norma, dan perilaku sosial yang akan mempengaruhi kehidupannya. Berkaitan dengan fenomena kemiskinan, keluarga miskin dapat didefinisikan sebagai keluarga yang sejak awal tidak memiliki harta kekayaan yang dapat digunakan atau memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Abdullah, 2008). Pekerja sosial erat hubungannya dengan penanganan kemiskinan. Pekerjaan sosial merupakan aktivitas pertolongan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat atau *Community Organizing* menjadi salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial untuk membangun sebuah masyarakat melalui pengumpulan sumber daya. Menurut Beckwith & Lopez dalam Ismail (2022), pengorganisasian masyarakat didefinisikan sebagai “proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin”. Dalam pekerjaan sosial, pengorganisasian masyarakat didefinisikan oleh Rothman dalam (Rothman, J.E., Erlich, J.L., & Tropman, 1995) yakni *earlier definition of community organization as a strategy of “purposive community change”*. Artinya, definisi awal dari pengorganisasian komunitas adalah sebagai sebuah strategi mengenai “perubahan komunitas yang bertujuan”. Pendapat lain mengenai pengorganisasian dikemukakan oleh Afandi dalam Siregar, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau pada bidang kegiatan tertentu. Adapun Adi Sasongko dalam Marliyana (2020), mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam pengorganisasian masyarakat, yakni terdiri dari persiapan sosial, pelaksanaan, evaluasi, dan perluasan. Persiapan sosial merupakan langkah dalam mengenalkan dan menyadarkan permasalahan kepada masyarakat untuk kemudian dilakukan kegiatan sesuai dengan pertimbangan kemampuan, waktu, dan sumber daya. Kemudian, dilakukan evaluasi selama dan setelah kegiatan berlangsung, serta perluasan dilakukan dengan penambahan jumlah dan kualitas kegiatan sehingga mencapai kepuasan masyarakat.

Pembentukan koperasi menjadi salah satu bentuk dari pengorganisasian masyarakat, yakni dilakukan melalui pendekatan *community development* atau meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat lokal. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, pengertian koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, berdasar atas azas kekeluargaan. Lebih lanjut, Hatta dalam Safitri (2023), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong dan semangat gotong-royong. Semangat tersebut didorong oleh keinginan seseorang memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seseorang untuk semua dan semua untuk seorang’. Secara umum, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota maupun masyarakat pada umumnya melalui pembangunan tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dengan dilandasi sila-sila dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian koperasi didasarkan kebutuhan anggota, umumnya di Indonesia terdapat koperasi konsumsi, koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha (KUD). Adapun faktor keberhasilan koperasi menurut penelitian Catur (2018) menemukan bahwa pengetahuan perkoperasian, kemampuan pengurus, kualitas pelayanan koperasi dan minat mengikuti koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi anggota KUD.

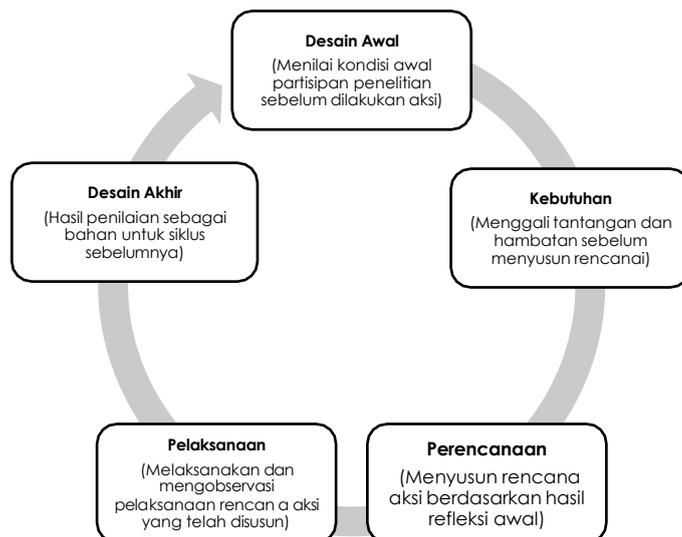
Kabupaten Bandung Barat memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, yakni berada di angka 10,52% atau sebanyak 179.430 jiwa (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2024). Angka ini lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional, yakni sebesar 9,06% (BPS, 2024). Kabupaten Bandung Barat melakukan peningkatan potensi untuk menunjang perekonomian masyarakat melalui pengadaan koperasi. Koperasi di Kabupaten Bandung Barat saat ini jumlahnya cukup banyak tetapi sifatnya sangat fluktuatif ditandai dengan jumlah koperasi mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Adapun jumlah koperasi pada tahun 2020 berjumlah 415, sedangkan pada tahun 2021 mencapai sebanyak 459 unit (BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021). Koperasi Awilarangan Mukti Rahayu atau dikenal dengan Koperasi Kamura

telah didirikan sejak tahun 2018 atas inisiatif tokoh masyarakat. Koperasi ini memiliki program inti, yakni program pembiayaan mikro bagi usaha yang dimiliki oleh keluarga miskin di Desa Mekarmukti. Berkaitan dengan Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi pada saat Praktikum Manajemen Pengubahan Komunitas, ditemukan bahwa desain ini memiliki beberapa hambatan dan tantangan, antara lain: (1) tidak banyak diminati karena adanya bank keliling/bank emok; (2) proses pengorganisasian kurang partisipatif hingga presentase keikutsertaan menurun dari tahun ke tahun; (3) pengembalian pinjaman yang rendah.

Hasil akhir praktikum merekomendasikan rekayasa Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi menjadi Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer To Peer Lending*. Menurut Aprita (2021), *peer to peer lending* saat ini memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara (Bank). Pelaksanaan Peer to Peer Lending lebih banyak dilakukan secara online atau melalui sebuah platform tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan secara konvensional atau offline. Adapun skema *peer to peer lending* didasari pada 3 komponen, yakni *lender*, P2P marketplace, dan *borrower*. Skema ini kemudian diintegrasikan pada sub-sub koperasi untuk memudahkan sistem perkreditan pada koperasi, sehingga dapat menarik minat dan partisipasi masyarakat khususnya keluarga miskin. Pendekatan terintegrasi pada koperasi berhubungan dengan konsep efisiensi operasional yang terkait dengan kegiatan usaha dari perusahaan koperasi dan efisiensi anggota sebagai pihak yang akan memperoleh *cooperative effect* (Wirasmita dalam Dasuki, 2015). Artinya, kegiatan yang terintegrasi pada koperasi memiliki manfaat positif untuk meningkatkan efek keterlibatan dari pihak-pihak yang berperan pada koperasi itu sendiri. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan desain ini karena mengingat bahwa pengorganisasian masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang dijalankan koperasi simpan pinjam telah banyak berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi anggotanya (Riyanto, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi (Sugiyono, 2019). Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan partisipatif (Participatory Action Research/PAR). Penelitian tindakan partisipatif (PAR) menurut (Pujileksono, dkk, 2023). didefinisikan sebagai “salah satu bagi peneliti untuk terlibat langsung bersama peserta sebagai mitra dalam proses menghasilkan pengetahuan dan mengubah masyarakat.” Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purhantara (2010), dengan informan yang ditentukan melalui *purposive sampling* atau pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berikut adalah langkah-langkah penelitian PAR:



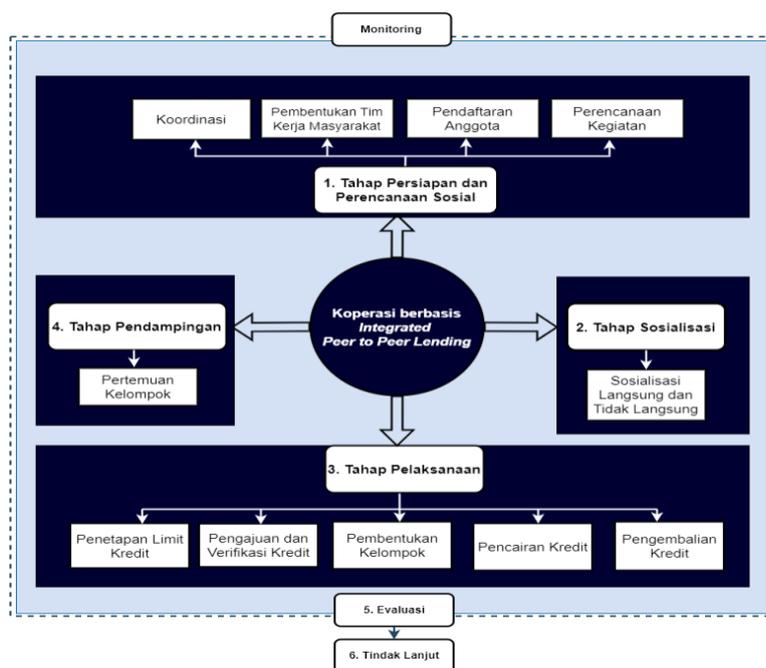
Gambar 3. 1. Langkah-Langkah Penelitian PAR
sumber: Pujileksono, dkk. Tahun 2023

HASIL PENELITIAN

Desa Mekarmukti merupakan salah satu desa di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Desa Mekarmukti sendiri saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.896. Berdasarkan hasil asesmen pada Praktikum Manajemen Perubahan Komunitas diketahui bahwa masyarakat Desa Mekarmukti sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah dengan ciri khas usaha masing-masing, seperti sentra kasur, sentra ikan pindang, sentra wajik, sentra gurilem, hingga konveksi. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, tetapi tingkat kemiskinannya cukup tinggi adalah RW 08. RW 08 dikenal sebagai wilayah “Sentra Usaha Pindang”. Masyarakat desa RW 08 berjumlah 400 KK di mana sebagian besar masyarakatnya berjualan olahan ikan pindang sejak tahun 1970. Koperasi menjadi salah satu sistem sumber formal bagi masyarakat Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat yang didirikan dengan nama Awilarangan Mukti Rahayu. Koperasi ini bergerak pada beberapa bidang unit usaha, seperti usaha simpan pinjam, usaha penjualan barang, dan usaha jasa percetakan. Berikut hasil penelitian yang dilakukan:

DESAIN AWAL PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER (I-P2P) LENDING

Gagasan desain ini didasarkan pada permasalahan upaya peningkatan ekonomi keluarga miskin melalui pengorganisasian pada koperasi tidak diminati karena maraknya bank keliling / bank emok yang lebih mudah diakses dan sistem perkreditan yang lebih familiar. Keluarga miskin yang menjadi anggota koperasi pun kurang berpartisipasi aktif sehingga presentase keikutsertaan anggota dari tahun ke tahun. Dengan Desain Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending*, diharapkan keluarga miskin dapat lebih mudah berpartisipasi, terorganisir, memiliki sistem perkreditan yang lebih mudah dipahami, dan membantu peningkatan ekonomi keluarga miskin yang menjadi anggota koperasi. Desain awal pengorganisasian keluarga miskin melalui koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* terdiri dari (1) tahap persiapan dan perencanaan sosial, meliputi kegiatan koordinasi, pembentukan tim kerja masyarakat, pendaftaran anggota, dan perencanaan kegiatan; (2) tahap sosialisasi secara langsung dan tidak langsung; (3) tahap pelaksanaan, meliputi penetapan limit kredit, pengajuan dan verifikasi kredit, pembentukan kelompok, pencairan kredit, dan pengembalian kredit; (4) tahap pendampingan yang dilakukan secara tatap muka melalui pertemuan kelompok. Berikut desain yang dikembangkan pada saat Praktikum Manajemen Perubahan Komunita Tahun 2023:



Gambar 4.1 Desain Awal Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Tahun 2023

KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN DESAIN PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER LENDING

Penelitian ini melibatkan serangkaian FGD (*focus group discussion*) dan wawancara mendalam. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui pendapat informan mengenai kebutuhan penyempurnaan dari desain yang dikembangkan. Kelebihan desain yang dikembangkan yang pertama adalah desain perkreditan yang dikembangkan mudah dipahami dan terstruktur karena disertai dengan penjelasan-penjelasan yang rinci serta dapat mendorong minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan pada koperasi. Namun, dibalik Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* dibutuhkan penyempurnaan untuk memaksimalkan pelaksanaan

desain pengorganisasian agar koperasi lebih mudah diakses, yakni: (1) Partisipasi *stakeholder* yang perlu dilibatkan, dalam hal ini desain koperasi ini membutuhkan sistem perkreditan yang melibatkan banyak aktor / pihak luar sebagai pendukung modal koperasi dan modal peminjaman bagi anggota; (2) Istilah dan mekanisme desain perlu dilengkapi. Temuan penelitian menjelaskan bahwa perlu adanya perbaikan istilah dan tahapan kegiatan yang bisa dilengkapi serta penentuan teknik untuk memudahkan pelaksanaan tahapan; (3) Skema perkreditan non-tunai, dapat juga diganti melalui penyediaan paket usaha bagi partisipan keluarga miskin; (4) Pembagian peran dan fungsi yang jelas perlu ditambahkan dalam langkah kegiatan untuk mempermudah pembagian tanggungjawab di antara anggota.

PERENCANAAN DESAIN PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER LENDING

Perencanaan dalam penelitian ini diarahkan pada perencanaan implementasi desain dan telah menjawab kebutuhan-kebutuhan akan penyempurnaan desain yang telah dikemukakan. Komponen-komponen perencanaan implementasi desain yang disusun, meliputi nama desain, tujuan yang ingin dicapai, tim kerja masyarakat dan partisipan, rencana Rincian Anggaran Biaya (RAB), kalender kegiatan, serta janji hati. Penyusunan rencana juga mempertimbangkan identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat menggunakan SWOT dalam kegiatan partisipasi keluarga miskin pada koperasi. Berikut analisis SWOT dari desain yang dikembangkan:

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya model pengorganisasian keluarga miskin yang terintegrasi 2. Adanya pelaksana kegiatan yang mendukung 3. Adanya komitmen dari pengurus koperasi 4. Adanya antusiasme dan dukungan dari keluarga miskin 5. Adanya sarana dan prasarana yang memadai 6. Adanya dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain teknologi yang diusulkan merupakan hal belum pernah diimplementasikan 2. Memerlukan sosialisasi yang masif agar kegiatan berjalan dengan lancar 3. Pemahaman dan kesadaran pengurus dan anggota yang berbeda-beda
Peluang (O)	Ancaman (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pesaing koperasi lain 2. Adanya kelembagaan lokal yang dapat diakses untuk kolaborasi 3. Adanya dukungan pemerintah desa terhadap melaksanakan koperasi 4. Ketersediaan barang-barang perkreditan yang dibutuhkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penolakan dari anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan 2. Kredit macet yang dilakukan oleh kelompok 3. Rawan menimbulkan konflik dengan warung kelontong terdekat

Tabel 4. 9 Analisis SWOT Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis Integrated Peer to Peer Lending Tahun 2024

IMPLEMENTASI DESAIN PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER LENDING

Tahapan persiapan dan perencanaan sosial merupakan tahapan pertama dalam melaksanakan desain. Tahapan persiapan dan perencanaan sosial dimulai pada tanggal 5 & 7 Maret 2024. Persiapan dan perencanaan sosial dilakukan melalui sernagkaian kegiatan, yakni: (1) Koordinasi, pada tahap ini koordinasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka bersama pengurus dan *stakeholder* terkait, serta melaksanakan perizinan kepada pemerintah desa setempat. Setelahnya, melakukan kesepakatan untuk menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus agar pelaksanaan program terselenggara dengan baik; (2) Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM), guna memudahkan koordinasi dan pembagian tanggungjawab. Komposisi TKM terdiri dari 8 orang, yakni 2 orang Kader PKK, 1 orang pendamping koperasi, 2 orang pengurus Koperasi, dan 2 orang perwakilan keluarga miskin. Adapun peran TKM yang dibentuk terdiri dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, Pendamping Koperasi, Koordinator Tim Lender, Koordinator Konsumsi, Koordinator Dokumentasi, dan Koordinator Logistik; (3) Diskusi formulir kepesertaan, ditunjukkan untuk menyepakati formulir yang dijadikan perjanjian sebagai anggota program & kesepakatan berkas administrasi untuk memenuhi persyaratan program. Persyaratan program yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai *borrower* adalah memiliki fotokopi KTP/KK, telah menjadi anggota koperasi selama 3 bulan, telah melunasi simpanan pokok dan wajib, memiliki usaha olahan ikan pindang. Sedangkan, syarat menjadi *lender*, yakni memiliki fotokopi KTP/KK, telah mendaftar menjadi anggota, dan telah melunasi simpanan pokok dan wajib; (4) Pendaftaran anggota menjadi bagian penting bagi masyarakat apabila akan menerima manfaat-manfaat yang ada pada koperasi. Pendaftaran anggota dilaksanakan bagi Tim Lender yang belum bergabung pada koperasi. *Lender* merupakan pemberi dana yang menjadi aspek penting dalam desain; (5) Perencanaan kegiatan, mulai dari penyiapan surat undangan, persiapan sosialisasi, penentuan waktu dan tempat, serta sumber biaya, serta kesepakatan kalender kegiatan.

Tahap sosialisasi guna menentukan peserta kegiatan yang berminat dan berkomitmen mengikuti penerapan desain. Sosialisasi dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni (1) sosialisasi langsung melalui sosialisasi *door-to-door* /

kunjungan dari rumah ke rumah dan ceramah tatap muka; (2) sosialisasi tidak langsung melalui penyebaran flyer/ brosur dan banner. Hasil penelitian menjelaskan bahwa partisipan keluarga miskin yang memiliki minat mengikuti kegiatan adalah berjumlah 13 orang beserta 2 orang dari TKM, sehingga total keseluruhan peserta kegiatan menjadi 15 orang.

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti dari desain yang dikembangkan. Pelaksanaan desain dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024 mulai pukul 10.45 – 11.00 WIB bertempat di teras Kantor Koperasi KAMURA. Adapun langkah-langkah pada tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Penetapan limit kredit paket usaha untuk setiap kelompok adalah sebesar Rp125.000,-; (2) Pengajuan dan verifikasi kredit paket usaha dilakukan dengan mengisi formulir kepesertaan kelompok peer borrower yang berisikan pernyataan kesanggupan mengikuti kegiatan dan pemenuhan syarat administrasi; (3) Pembentukan *peer borrower* didasarkan pada jarak tempat tinggal antar partisipan keluarga miskin. Hal ini dapat mempermudah kerjasama dan rasa persaudaran serta dukungan satu sama lain. Lender atau pemberi pinjaman juga diberikan kesempatan untuk bergabung dengan kelompok sebagai pengawas dan pemberi dukungan terhadap *peer borrower*; (4) Pencairan kredit paket usaha di mana masing-masing anggota akan menanggung kredit sebesar Rp25.000,-. Perkreditan pun dilaksanakan dengan membeli paket senilai Rp25.000,- kepada koperasi, kemudian masing-masing anggota melakukan pencicilan kredita selama 6 hari dengan besaran Rp4,200,- per hari. Pencairan kredit pada penelitian telah terlaksana sebanyak tiga kali sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disepakati; (5) Pengembalian Kredit Paket Usaha dilaksanakan dengan mengisi buku saku yang telah dibagikan pada saat pengajuan kredit. Berdasarkan hasil penelitian, selama 3 kali pengembalian kredit, anggota kelompok memiliki tingkat pengembalian sebesar 100% yang artinya seluruh anggota mampu membayar kredit.

Tahap pendampingan terdiri dari diskusi kelompok bersama. Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kelompok, memberikan pengarahan, serta dukungan maupun motivasi antara sesama partisipan. Kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hasil penelitian adalah: (1) pengecekan buku saku pengembalian kredit; (2) diskusi mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pengembalian kredit dan permasalahan usaha; (3) diskusi mengenai solusi menanggulangi hambatan pengembalian kredit; (4) pemberian pengarahan dan motivasi dari tim kerja masyarakat untuk mengikuti kegiatan koperasi secara berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahapan untuk mengetahui permasalahan dan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan didasarkan pada evaluasi proses dan hasil. Adapun evaluasi proses yang ditemukan adalah pertama, mengenai kepasifan partisipan keluarga miskin terutama pada pertemuan berlangsung. Kedua, yakni partisipasi pelaksana kegiatan dalam desain dinilai cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran TKM ketika mengikuti rangkaian kegiatan. Ketiga, kemudahan desain untuk diterapkan dinilai sangat baik. Desain sangat mudah diterapkan oleh TKM karena sumber daya telah dimiliki oleh koperasi dan seluruh anggota memahami desain yang diterapkan dengan sangat baik karena perkreditan sudah sangat familiar dan memudahkan akses pada koperasi. Keempat, yakni pengembalian kredit oleh partisipan keluarga miskin dinilai sangat baik. Seluruh anggota koperasi dapat mengembalikan kredit yang disepakati sesuai dengan waktu dan tidak memiliki kendala terhadap pengembalian karena besaran kredit mudah dijangkau dan tidak memberatkan. Terakhir, partisipasi stakeholder pada kegiatan dinilai baik oleh TKM karena stakeholder yang terlibat masih sedikit, yakni hanya melibatkan tokoh masyarakat setempat, seperti Ketua RW dan Kader PKK, serta anggota koperasi itu sendiri.

Sedangkan, evaluasi hasil berdasarkan penelitian menemukan bahwa Desain Pengorganisasian melalui Koperasi berbasis Integrated Peer to Peer Lending, yakni (1) dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi penuh keluarga miskin dalam kegiatan koperasi yang dilaksanakan; (2) Desain mendorong pengurus koperasi memiliki kemampuan untuk mengelola sistem yang lebih mudah dalam perkreditan; (3) Pengembalian kredit kepada koperasi yang dilakukan semakin meningkat; (4) mendorong stakeholder terlibat dalam kegiatan koperasi sebagai lender atau pemberi pinjaman kepada keluarga miskin

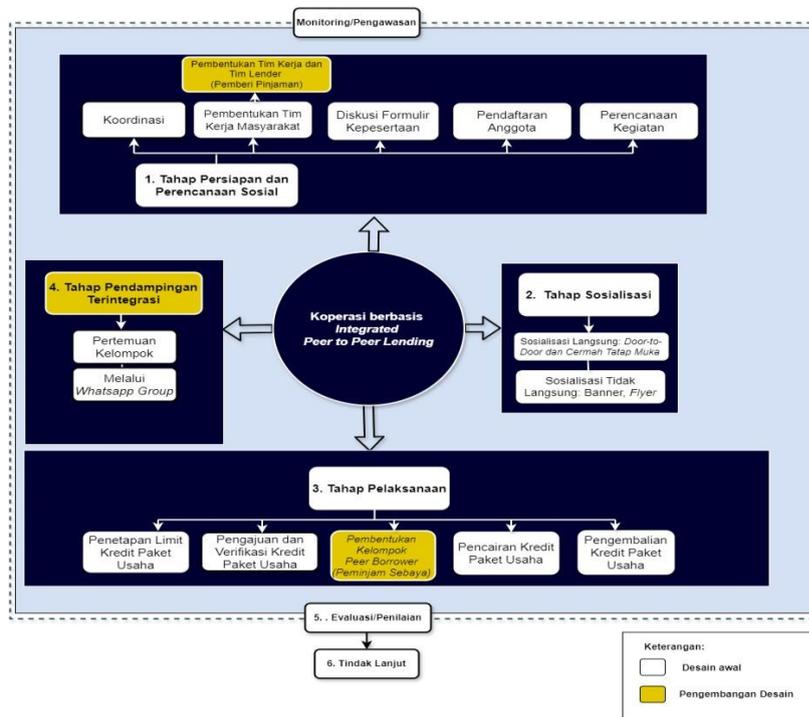
Tindak lanjut dilakukan dengan melakukan rujukan kepada Pengurus Koperasi untuk menindaklanjuti, yakni berupa pemisahan kegiatan pengumpulan data mengenai investor yang berpotensi serta adanya kegiatan home visit yang dilakukan oleh Ketua Kelompok terhadap anggota kelompoknya sehingga memudahkan pengembalian dan pencairan kredit yang dilakukan. Adapun, rujukan juga dilakukan kepada pendamping koperasi untuk melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM agar lebih aktif dalam memberikan pendampingan, serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memperkuat keterlibatan keluarga miskin dalam sistem sumber yang tersedia.

DESAIN AKHIR PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI BERBASIS INTEGRATED PEER TO PEER LENDING

Diskusi desain akhir membahas mengenai proses penerapan, pemahaman informan terkait desain yang diterapkan, serta pengumpulan aspirasi, saran, dan masukan terkait penyempurnaan akhir Berdasarkan diskusi bersama TKM, terdapat beberapa poin penting terkait pencapaian pelaksanaan desain yang dapat menyempurnakan desain akhir meliputi (1) memperkuat tahapan pengumpulan data untuk mempermudah identifikasi stakeholder; (2) pendampingan dan pemberian dukungan perlu dilakukan untuk memperkuat interaksi individu antara pengurus, lender, dan borrower ; (3) Materi pendampingan juga diperkaya oleh para ahli/pakar; (4) Penyebaran flyer/brosur di tempat strategis; (5) Desain dapat dilakukan jangka panjang oleh pengurus.

Hasil penelitian menetapkan bahwa Desain ini bernama “Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui

Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending*”. Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* merupakan pengembangan pendekatan dan teknik untuk melakukan perubahan terhadap keluarga miskin secara bertujuan, dengan membantu menjembatani partisipasi dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin melalui pembangunan jaringan dan sumber daya yang dimiliki. Berikut desain akhir yang dihasilkan, yakni sebagai berikut:



Gambar 4. 20 Desain Pengorganisasian Keluarga Miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* Tahun 2024

PEMBAHASAN

KOPERASI SEBAGAI SISTEM SUMBER FORMAL BAGI KELUARGA MISKIN

Sistem sumber merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai yang berada dalam simpanan atau telah tersedia, di mana orang dapat menggali dan menggunakan sebagai alat sehingga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan permasalahan (Siporin, 1975). Koperasi adalah salah satu sumber daya dalam mengentaskan kemiskinan yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam perspektif pekerjaan sosial, koperasi dipandang sebagai sebuah sistem sumber formal, yakni untuk mendapatkan akses dan menggunakan sistem sumber daya formal dengan memberikan bantuan dalam menemukan sumber daya yang tepat atau mengisi formulir permohonan dan menggunakan pengaruh untuk memotong birokrasi demi memajukan anggotanya (Pincus & Minahan, 1973). Koperasi sebagai sebuah sistem sumber formal merujuk pada sebuah organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan keluarga miskin, salah satunya adalah alat negosiasi untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi merupakan sebuah organisasi keanggotaan yang keberadaannya diperlukan dan dirasakan oleh masyarakat dan bernilai sosial ekonomi yang menguntungkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Birchall (2003) dalam bukunya yang berjudul *“Rediscovering The Cooperative Advantage: Poverty Reduction Through Self-Help”* yang mengemukakan bahwa terkadang koperasi tidak selalu memberikan manfaat kepada masyarakat miskin tetapi di sisi lain prinsip keanggotaan yang terbuka yang memberikan manfaat tersebut. Manfaat lain dari koperasi terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan adalah sangat membantu perekonomian masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pembiayaan mikro yang sesuai dengan situasi dan perkembangan yang ada, salah satunya adalah usaha milik masyarakat (Riyanto, 2019). Koperasi mempermudah masyarakat khususnya pedesaan untuk mengembangkan perekonomian melalui kegiatan usaha pada koperasi.

Namun, koperasi sebagai sebuah sistem sumber formal bagi keluarga miskin mengalami berbagai hambatan dan kendala, seperti kurangnya minat dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti koperasi hingga sistem perkreditan yang kurang aksesibel dan familiar bagi masyarakat miskin, sehingga dibutuhkan pembenahan sistem koperasi yang menarik bagi masyarakat untuk meningkatkan minat dan partisipasi. Permasalahan ini juga telah banyak dikemukakan pada penelitian Permana & Adhiem (2019), yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga jasa keuangan selain perbankan memiliki berbagai permasalahan, seperti permodalan, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya SDM dengan kompetensi di bidang perkoperasian, serta yang paling utama adalah kurangnya partisipasi karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan diluar jasa perbankan.

Sebagai solusi atas hambatan dan kendala pada sistem perkreditan pada koperasi simpan pinjam sebagai sebuah sistem sumber formal yang kurang diminati dan tidak familiar di masyarakat serta pengaplikasian skema peer to peer lending pada koperasi yang cukup beresiko. Skema ini sangat populer di kalangan masyarakat dan beberapa koperasi maupun organisasi formal lainnya juga turut mengembangkan skema ini. Namun, skema peer to peer lending pada koperasi sendiri yang telah diterapkan dan diteliti melalui penelitian Zakaria (2019) menunjukkan bahwa skema peer to peer ini memiliki kelemahan dimana memerlukan waktu dan resiko yang tinggi serta tidak adanya kegiatan untuk mempertemukan lender dan borrower dalam mendukung keberlanjutan dan kemudahan pembiayaan yang dilakukan.

Untuk itu, dikembangkan koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* yang diharapkan dapat dengan mudah mendorong inklusi keuangan dengan memberikan alternatif pinjaman bagi borrower (peminjam) dengan proses yang lebih mudah dipahami serta menjadi alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi bagi lender (peminjam) di mana lender dapat memilih kelompok borrower yang didanai sesuai dengan kelayakan dan bentuk pinjaman yang disepakati, serta koperasi memiliki dana yang memadai dalam permodalan serta sistem perkreditan yang mudah dipahami baik oleh pengurus maupun keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian Salakpi dalam Nasution (2020) yang membuktikan bahwa produk-produk perbankan dinilai kurang adaptif dengan karakteristik masyarakat miskin dan masyarakat miskin mempunyai kesulitan dalam mengakses perbankan akibat beragam persoalan, seperti kendala administratif dan karakter kultural yang konservatif sehingga diperlukan desain pembiayaan bagi keluarga miskin yang mudah dipahami agar mereka menjadi lebih produktif dan memiliki penghasilan mandiri dan terstruktur.

PELIBATAN LENDER DENGAN PENYEDIAAN DANA DALAM DESAIN PENGORGANISASIAN KELUARGA MISKIN MELALUI KOPERASI

Istilah "lender" atau pemberi pinjaman merupakan istilah yang digunakan pada skema *Peer to Peer Lending* sebagai *financial technology*. Berdasarkan hasil temuan, stakeholder yang diorganisir menjadi lender merupakan sumber daya yang dibutuhkan anggota koperasi tetapi pelaksanaannya harus terintegrasi dan terjembatani dengan baik. Hal ini selaras dengan penelitian Tampubolon (2019) yang menyatakan bahwa sebagai penghubung, koperasi sebagai *marketplace* harus dapat menjembatani pemberi kredit dengan penerima kredit.

Lender dalam penelitian ini melakukan prosedur sesuai dengan skema peer to peer, yakni memilih produk usaha koperasi yang sudah disosialisasikan kemudian mendaftarkan menjadi anggota dan membayar simpanan sebagai deposit untuk membiayai penerima kredit. Hasil temuan menunjukkan bahwa kelebihan penggunaan simpanan lenders sebagaimana aspek permodalan dari koperasi adalah transaksi penggunaan pembiayaan oleh borrowers menjadi lebih cepat dan mudah karena hanya tinggal mengurangi simpanan sukarela milik lenders. Kemudian, kekurangan yang dialami adalah nominal yang ditentukan sedikit daripada saldo yang dimiliki. Namun, hal ini pun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan borrowers.

Pemberi kredit merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk membiayai penerima kredit sesuai dengan *fact sheet* yang dimiliki oleh *marketplace*. Pelibatan lenders pada penelitian ini ditekankan pada panggilan kepada stakeholder untuk menyediakan sumber daya keuangan dalam mendukung kegiatan sosial atau lebih bersifat pada *crowdfunding*. Hal ini selaras dengan pendapat dari Akbar dalam Wahyuningsih (2019) yang menyatakan bahwa teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas dapat disebut dengan *crowdfunding*.

Secara keseluruhan, pelibatan lenders pada koperasi bukan hanya sebagai pemberi dana yang mencari keuntungan semata tetapi juga ikut serta dalam pembiayaan usaha di tingkat lokal sebagai penyedia dana pada koperasi. Adanya pelibatan lending secara terintegrasi pada desain ini sesuai dengan skema peer to peer lending yang bersifat konvensional tetapi tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan tetapi juga profit sosial dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat guna mendukung perekonomian di tingkat lokal/pedesaan.

PENGORGANISASIAN PEER BORROWER SEBAGAI PENDEKATAN PERKREDITAN BERBASIS KELOMPOK

Istilah *borrower* pada skema *peer to peer lending* lebih ditekankan pada penerima pinjaman. Borrower atau peminjam menjadi penerima dan setelah disaring oleh koperasi sebagai penyedia layanan. Peer borrower dalam desain penelitian ini merujuk pada interaksi antar sesama keluarga miskin untuk mempermudah penerimaan pembiayaan dari kelompok lender. Peer to peer interaction menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga miskin dengan cara saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang mirip sehingga mudah saling memahami. Hal ini sejalan dengan konsep peer to peer yang dikemukakan oleh Rohrbeck & Garvin (2014) yang menyatakan bahwa hubungan teman sebaya mengacu pada jenis hubungan antarpribadi di mana hubungan berkembang dalam proses interaksi dalam skala kecil kelompok individu yang mempunyai hubungan erat satu sama lain lainnya berdasarkan minat dan persahabatan yang sama.

Pembentukan kelompok sebaya dapat mempermudah perkreditan pada taraf kelembagaan lokal. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu, Khandker (2010) menyatakan bahwa pinjaman berbasis kelompok dengan tabungan wajib, seperti koperasi dapat meningkatkan kondisi keuangan dan disiplin sosial para anggotanya. Selain itu, pinjaman berbasis kelompok juga meningkatkan tingkat pemulihan pinjaman dengan menyediakan sarana yang lebih murah, sekaligus membantu pemberi pinjaman dan pinjaman menyerap berbagai guncangan yang mungkin terjadi.

Desain ini juga mendasari pengambilan keputusan dalam menentukan serangkaian kegiatan untuk menopang kebutuhan anggota sesuai dengan permasalahan yang dimiliki, khususnya para *peer borrower*. Judianto, dkk (2023) menyatakan bahwa ditemukan dinamika keterlibatan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh struktur-struktur yang partisipatif yang diterapkan. Desain yang inklusif dapat memberi ruang yang setara bagi berbagai anggota masyarakat sehingga memberi dampak positif pada keputusan-keputusan yang dihasilkan.

Selain itu, pengorganisasian keluarga miskin juga mendukung adanya pendampingan yang lebih efisien dan efektif melalui pertemuan antara sesama anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan Senda (2019) yang menyatakan bahwa keanggotaan kelompok masyarakat pada *bridging social capital* tidak hanya merefleksikan kemampuan suatu perkumpulan atau asosiasi sosial melainkan juga anggota kelompok masyarakat tersebut. Modal sosial ini menjembatani ikatan dari beberapa orang, seperti teman jauh dan rekan kerja. Artinya, koperasi juga dapat menjembatani ikatan antara lender dengan borrower melalui pendampingan.

KESIMPULAN

Pengorganisasian masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam mengembangkan sebuah komunitas melalui kegiatan menemu-kenali berbagai jaringan dan aktor yang dapat dilibatkan pada kegiatan secara bertujuan. Koperasi menjadi salah satu penciptaan sistem sumber formal pada model pengorganisasian masyarakat yang dapat dimanfaatkan dan mudah ditemui. Namun, pada kenyataannya, terdapat kecenderungan di mana keluarga miskin tidak memiliki minat untuk mengakses koperasi karena pemberlakuan sistem simpanan sebagai bentuk tabungan bagi keluarga miskin. Untuk itu, diperlukan desain pengorganisasian keluarga miskin melalui koperasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, yakni melalui kegiatan Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending*.

Penerapan desain diawali dengan tahapan persiapan dan perencanaan sosial untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan keluarga miskin serta menghimpun koordinasi dan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan selama proses penerapan desain. Adanya sosialisasi juga menjadi tahapan yang vital sebelum memulai pelaksanaan karena hal ini merupakan tahapan untuk menilai minat dan antusiasme dari partisipan keluarga miskin. Kemudian, tahapan pelaksanaan Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan, TKM dan partisipan keluarga miskin mulai aktif dalam. *Peer borrower* menjadi inti dari pelaksanaan desain di mana kelompok ini merupakan hasil pengembangan yang memperkuat sistem perkreditan anggota koperasi dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong para anggota. *Peer to peer interaction* menjadi bagian penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga miskin dengan cara saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang mirip dan saling memahami. Adapun tahapan akhir yang dilakukan adalah menilai pelaksanaan desain yang dilakukan secara partisipatif.

Secara keseluruhan, pengembangan desain pengorganisasian keluarga miskin melalui Koperasi berbasis *Integrated Peer to Peer Lending* merupakan langkah yang efektif dalam mengorganisir keluarga miskin bertujuan karena dapat membantu meningkatkan partisipasi keluarga miskin terhadap kegiatan koperasi, menjadikan koperasi semakin familiar bagi keluarga miskin dan membantu perekonomian dengan memanfaatkan sub-sub sistem pada koperasi secara terintegrasi. Selain itu, disimpulkan bahwa pengorganisasian menitikberatkan pada pengimpunan sumber-sumber daya yang dapat dikenali dan digunakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2008). *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (Di Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Aprita, S. (2021). Peranan *Peer to Peer Lending* dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Presentase Penduduk Miskin Tahun 2024*. Retrieved from bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2024). *Presentase Penduduk Miskin Jawa Barat Maret 2024 turun menjadi 7,46 persen*. Retrieved from jabar.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2021). *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan, 2020-2021*. Retrieved from bandungbaratkab.bps.go.id.
- Bharadwaj, B. (2012). *Roles of Cooperatives in Poverty Reduction: A Case of Nepal*. *Nepjol. Info*.24(1). Diakses melalui <http://www.acdivocacoopex.org/>
- Birchall, J. (2003). *Rediscovering The Cooperative Advantage: Poverty Reduction Through Self-Help*. Labour, 75. ISBN 92-2-113603-5.
- Catur, I.K. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Jembrana*. Tesis. Bali: Universitas Udayana.
- Dasuki. (2015). *Pendekatan Terintegrasi Untuk Mencapai Sustainability Koperasi*. 5(3).
- Ismail, A. (2022). *Memperkuat Pengorganisasian Masyarakat Desa*. *Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh)*, 2(1), 43–51. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1135>
- Judianto, L., dkk. (2023). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779-1787. DOI: 10.36312/jcm.v3i2.2367.
- Khandker, S. R. (2010). *Grameen Bank: Impact, costs, and program sustainability*. *Asian Development Review*, 14(1), 97–130. Retrieved from <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S016110596000048>
- Marliyana, T. (2020). *Pengorganisasian Kelompok Tani Dalam Memperjuangkan Perhutanan Sosial (Studi Kasus Pengorganisasian Stam Di Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9, 376-395. DOI: 10.20961/jas.v9i0.41369.
- Nasution, L., Z. (2020). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal*. *Maker: Jurnal Manajemen STIE Sultan Agung*, 6 (2), Hal. 117-133. Diakses melalui : <http://www.maker.ac.id/index.php/maker>

- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2019). *Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Kajian*, 24(2), 103–112.
- Pincus, A., & Minahan, A. (1973). *Social Work Practice: Desain and Methode*. F.E. Peacock.
- Pujileksono, S., Yuliani, D., Susilawati, Kartika, T. (2021). *Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial*. Intrans Publishing.
- Pujileksono, S., Yuliani, D., Susilawati, Kartika, T. (2023). *Riset Terapan Pekerjaan Sosial: SSD, PAR, dan R&D*. Intrans Publishing.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riyanto, P. (2019). *Program Pembiayaan Mikro Pada Koperasi Lampung 1440 H / 2019 M -Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pembiayaan Mikro Pada Koperasi*. http://repository.radenintan.ac.id/7451/1/SKRIPSI_PULUNG.pdf
- Rohrbeck, C.A., Garvin, M. (2014). Peer Relationships: Promoting Positive Peer Relationships During Adolescence. In: Gullotta, T.P., Bloom, M. (eds) *Encyclopedia of Primary Prevention and Health Promotion*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5999-6_223
- Rothman, J.E., Erlich, J.L., & Tropman, J. E. (1995). *Tactics and Technique of Community Intervention*. F.E. Peacock.
- Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Safitri, N. (2023). *Evaluasi Dampak Program Simpan Pinjam Koperasi Kelurahan terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Senda, A. R. (2019). *Tipologi dan Fungsi Modal Sosial dalam Pengelolaan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Jember. Diakses melalui <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/98283>
- Sinclair, Z., & Russ, L. (2006). *Organization Development for Social Change : An Integrated Approach to Community Transformation*. 1–12. <https://roadmapconsulting.org/resource/organization-development-for-social-change-an-integrated-approach-to-community-transformation/>
- Siporin, Max. (1975). *Introduction to Social Work Practice*. New York: Macmillan Publishing. Co, Inc.
- Siregar, P.A., dkk. (2021). *Pengembangan dan Pnegorganisasian Masyarakat Kesehatan*. Edisi 1, Cetakan ke-1, Medan: Merdeka Kreasi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sutrisna, I. W. (2019). *Penanggulangan Kemiskinan melalui Perekonomian Partisipatif*. *Jurnal Cakrawati*, 02(01), 42–50. http://repository.radenintan.ac.id/7451/1/SKRIPSI_PULUNG.pdf
- Tampubolon, H. (2019). *Seluk-Beluk Peer to Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188-198. DOI: 10.23920/jbmh.v3n2.15. ISSN: 25287273.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial.
- Wahyuningsih, S. (2019). *Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan berbasis Financial Technology*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(1), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6115>
- Wajuba, L., Fisabilillah, P., & Hanifa, N. (2021). *Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 2721–8287. <https://doi.org/10.31960/ijoeei.v1i3.866>
- Zakaria, F. (2019). *Analisis Penerapan Skema Peer to Peer Lending pada Pembiayaan UMKM Koperasi Insan Mandiri Syariah*. Tesis. Palangkaraya: IAIN. Diakses melalui <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2971/1/Fariz%20Zakaria%20-%2015015006.pdf>